

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH

Slamet Riyadi*

Abstract

The school principal was instrumental in optimizing the function of the school committee in advancing the school he leads, the role of the school committee is required in advancing education, school principals must have a style of leadership to enable the duties and responsibilities of school committees for the schools into schools that are reliable and qualified, disciplined, Science and technology and devoted to God Almighty.

Keywords: *Style of School Leadership, School Committee*

PENDAHULUAN

Eksistensi komite sekolah terhadap pendidikan merupakan suatu keharusan dan sangat dibutuhkan dalam memperluas dan meningkatkan mutu pembelajaran pada sekolah-sekolah yang memiliki sumberdaya sangat terbatas. Oleh karena itu komite sekolah harus dapat meningkatkan partisipasinya sebagai instrument control terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat atau yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lain, tetapi komite sekolah tetap sebagai mitra yang harus bekerja sama, saling mendukung dan membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah-sekolah. Dengan demikian komite sekolah mempunyai peran dan fungsi dalam lembaga sekolah tersebut.

Untuk mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik, perlu mengefektivitaskan komite sekolah dari sisi peran dan fungsi, karena jika diamati dengan baik. Peran dan fungsi komite sekolah sangat mempunyai sumbangan yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan menuntut fleksibilitas gaya kepemimpinan kepala sekolah yang professional dan akhirnya juga akan bermuara kepada kualitas pendidikan.

* Penulis Adalah Guru SMP Negeri 1 Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah

64. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan.... (Slamet Riyadi)

Peran dan fungsi mempunyai andil besar untuk memberikan masukan kepada pihak sekolah, oleh karena itu komite sekolah harus mendorong dan mendukung, orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan penggalangan dana, pengontrolan kegiatan pendidikan, memberi pertimbangan dan mediator dengan pemerintah dan warga sekolah lainnya serta menuntut kepada kepala sekolah agar lebih meningkatkan kemampuan manajerialnya terutama gaya kepemimpinannya dan manajemen pengelolaan dana bantuan langsung yang merupakan stimulant untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Komite Sekolah)

Peran kepala sekolah sebagai pimpinan mempunyai posisi yang strategis untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah, karena gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti mengkoordinasi, mengorganisir semua komponen dengan baik, akan membuat sistematika kerja lebih baik.

KAJIAN TEORITIK

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

Menurut Engkoswara (1987) bahwa gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin melakukan kegiatannya dalam membimbing, mengarahkan, mempengaruhi dan menggerakkan para pengikutnya atau bawahannya kepada suatu tujuan tertentu, Handoko (2000) mengidentifikasikan gaya kepemimpinan pada dua klasifikasinya yaitu pertama Gaya kepemimpinan dengan orientasi tugas, dalam hal ini pimpinan lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan dari pada pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Tugas yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kedua Gaya kepemimpinan dengan artinya pimpinan berusaha untuk lebih memotivasi karyawan atau bawahan dibanding mengawasi mereka. Mengadakan hubungan yang saling mempercayai, dan menghormati dengan para anggota kelompoknya dengan menciptakan suasana yang kondusif.

Menurut Mondy dan Premaeaux (1995) terdapat empat dasar gaya kepemimpinan yang lebih dikenal secara luas yaitu:

1. Gaya Otokratik

Pemimpin menyuruh kerjakan apa yang ditentukan oleh pemimpin dan harus dipatuhi tanpa bertanya. Kelompok pekerja ini tergolong teori X dan me Gregor. Gaya ini cukup berhasil jika tugas itu sederhana dan dikerjakan berulang-ulang di tambah lagi waktu pemimpin untuk berhubungan dengan pekerja sangat terbatas atau sangat singkat

2. Gaya Partisipatif

Para pekerja dilibatkan dalam mengambil keputusan, sedangkan keputusan akhir terletak pada pemimpin. Para pekerja akan merasa ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan rencana mereka ikut membuatnya.

3. Gaya Demokratik

Pemimpin mencoba melakukan apa yang diinginkan oleh sebagian besar bawahan para pemimpin. Dengan gaya partisipasi dan gaya demokratik cenderung memperlakukan pada pekerja/bawahan termasuk kelompok Teori Y dari Me. Gregor banyak pihak lebih menyukai gaya demokratik dengan pendekatan kelompok untuk meningkatkan manajemen.

4. Gaya Bebas

Pemimpin tidak terlibat lagi pada kerja unit, karena para pekerja/bawahan terdiri dari orang-orang ahli/spesialisasi dalam bidangnya. Tuntunan terhadap pemimpin dengan gaya ini perlu menjaga efektivitasnya dari para pekerja.

Berdasarkan teoritis gaya kepemimpinan diatas, seyogianya seorang kepala sekolah harus mampu mengimplementasikan gaya kepemimpinannya yang mampu untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya kepala sekolah tidak harus bergaya otoriter dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, akan tetapi kepala sekolah harus lebih mampu mengkondisikan gaya apa yang dibutuhkan pada saat itu. Bisa saja otoriter, bisa juga demokratis tergantung situasi yang menuntutnya. Dengan demikian perlu dikembangkan gaya kepemimpinan yang bersifat Situasional, artinya seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam menerapkan gaya kepemimpinannya harus memperhatikan keadaan atau situasi, jika situasi membutuhkan gaya otoriter, maka kepala sekolah melakukan gaya tersebut. Demikian juga sebaliknya situasi membutuhkan gaya partisipasi, maka

66. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan.... (Slamet Riyadi)

kepala sekolah harus melakukannya, dan seterusnya. Namun yang menjadi permasalahan kepala sekolah senantiasa menarapkan kepemimpinannya itu berdasarkan inters pribadi. Sulit untuk menerima saran dan kritikan dari orang lain (bawahan, guru dan staf). Jika kondisi ini yang sering ditampilkan maka sulitlah seorang kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah.

Peningkatan Partisipasi Komite Sekolah

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi permasalahan yang dilematis. Karena realitas partisipasi aktif masyarakat dapat di ukur dan di ketahui sampai sejauhmana keinginannya untuk memiliki tanggungjawab bersama atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah dewasa ini. Ironisnya aktifnya partisipasi masyarakat selalu diukur oleh materi. Artinya ada keuntungan masyarakat aktif, tidak ada keuntungan masyarakat pasif.

Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan gaya kepemimpinannya. Artinya kepiawaian kepala sekolah menarik hati dan memotivasi masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada transparansi di berbagai bidang membuat masyarakat lebih tertarik untuk bersama-sama membangun pendidikan.

Partisipasi masyarakat di kenal dengan istilah dewan pendidikan atau komite sekolah yaitu organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk memberikan pemahaman tentang komite sekolah, tujuan, fungsi dan peran sekolah, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian komite sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas dikemukakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali, peserta didik, komonitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen sekolah.

Dari pengertian diatas, dipahami bahwa komite sekolah merupakan suatu lembaga yang bersifat independent yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representase dari berbagai unsure yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Dalam memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dibutuhkan persiapan dan pembenahan yang sejalan dengan tuntunan perubahan yang dilandasi dengan kesepakatan, komitmen, kesadaran dan kesiapan dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang loyalitas pada usaha peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian menuntut terciptanya masyarakat sekolah yang sinergis, harmonis dan kompak dalam kerjasama dan bekerjasama dalam kekompakan. Maka komite sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang di bangun melalui kesepakatan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002).

Perubahan paradigma pendidikan dari Sentralisasi ke Desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan berpartisipasi tersebut melalui komite sekolah. Yang mengacu kepada Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat.

Komite sekolah pada intinya merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pendidikan, sangat dibutuhkan hubungan timbale balik antara sekolah dengan masyarakat, karena hubungan ini akan membuat semua merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan tersebut, sehingga tujuan pendidikan akan lebih optimal, karena kehadiran masyarakat dapat menumbuhkan motivasi kerja kepala sekolah. Guru dan jajarannya bahkan secara sistematis akan meningkatkan hasil belajar siswa, yang pada intinya meningkatkan mutu pendidikan.

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah ikut sertanya masyarakat dalam membantu penyelenggaraan dan pengelolaan proses pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan menurut Arifin (1986) telah diwujudkan dalam tugas dan tanggungjawab yaitu : 1) Mengadakan pertemuan-pertemuan antara orang

68. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan.... (Slamet Riyadi)

tua/wali murid dan guru-guru bersama-sama membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah, bertukar pikiran dan bila perlu mengambil putusan tentang suatu yang perlu diselenggarakan, 2) menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan oleh sekolah, murid dan guru yang belum dan tidak di cukupi oleh pemerintah.

Seyogianya kepala sekolah dengan kompetensi yang dimilikinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah lebih memberikan peluang kepada masyarakat atau komite sekolah untuk meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah harus memahami bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Mampu mengkondisikan situasi dan keinginan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Yang jelas bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah itu mampu untuk membuat masyarakat lebih tertarik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan kepala sekolah harus mampu memberikan bimbingan dan pengarahan tentang eksistensi komite sekolah dan apakah tujuan komite sekolah ada dilembaga persekolahan.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002). Tujuan dewan komite sekolah suatu organisasi masyarakat sekolah sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2002) bahwa komite sekolah juga berperan sebagai 1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, 2) mendukung penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan baik berupa pemikiran maupun financial, 3) mengontrol penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dalam rangka transparansi dan

pertanggungjawaban, 4) menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Permasalahan yang mendasar bagi masyarakat untuk aktif dalam penyelenggara pendidikan di sekolah adalah pemahaman akan peran dan fungsi komite sekolah yang belum utuh. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami akan tugas dan tanggungjawab komite sekolah. Sehingga dengan kemampuan dan pemahaman itu masyarakat akan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

Permasalahan lain itu yang juga perlu dilakukan perubahan adalah memberikan kesadaran akan saling membutuhkan interdisipliner antara sekolah dengan masyarakat. Pihak sekolah harus senantiasa memperhatikan dan menyampaikan informasi kepada komite sekolah tentang perkembangan sekolah. Sehingga komite sekolah mempunyai data di samping data yang diperoleh dari pengamatan sendiri untuk dianalisa dan memberikan solusi permasalahannya. Jika saling membutuhkan dan hubungan timbale balik itu tercipta, maka partisipasi komite sekolah akan lebih baik.

Secara umum permasalahan komite sekolah adalah adanya indikasi kurang efektifnya peran dan fungsi sekolah tersebut, fenomena ini terlihat dari komite sekolah kurang memperhatikan kinerja kepala sekolah, malas hadir jika mendapat undangan dari sekolah, jarang menghadiri rapat rutin pihak sekolah dengan masyarakat. Kurangnya usaha komite sekolah untuk melakukan kerjasama dengan dunia industri, usaha, organisasi atau perorangan bahkan kepada pemerintah, kurangnya komite sekolah melakukan pengawasan, hal ini terlibat dari tidak terjadwalnya kegiatan komite sekolah yang dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin (1986) *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta : Bulan Bintang.

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, (2003) *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.

70. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan.... (Slamet Riyadi)

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, (2002) *Manual Manajemen Proyek Basic Educational Project (BEP)*, Jakarta : Depdiknas.

Engkoswara, (1987) *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Masdar Maju.

Handoko, Hani, T, (1995) *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta : BPFE.

Herset, P.Blanchard, KH. (1988) *Management of Organization Behavior*, Utilizip Human Resources, Newyessy : Prentice Hall, Inc.

Mondy, R.Wayne dan Premeaux, Shane R., (1992) *Management : Concept, Pranctices, and Skill*, Massachusetts : Allyn and Bacon. Inc.

Undan-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003(UU RI NO. 20 TH 2003), Jakarta : Sinar Grafika.